



LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2025



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN



Januari 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami persembahkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2025 telah dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya..

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah serta sebagai implementasi dari sistem akuntabilitas kinerja pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2025.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman telah banyak membuahkan hasil, kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karna itu, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman dimasa yang akan datang. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi,dukungan dan bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2025.

Lubuksikaping, Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH



YUDESRI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Birokrasi yang berintegritas dan memiliki budaya melayani sangat dibutuhkan untuk mewujudkan program-program pembangunan strategis yang berdampak besar bagi masyarakat. Birokrasi juga merupakan alat utama dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berfungsi untuk menjamin pelaksanaan kebijakan secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Laporan kinerja disusun sebagai perwujudan akuntabilitas, transparansi dan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran Perangkat Daerah yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya. Selain itu Laporan Kinerja juga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2025 adalah sebagai gambaran pencapaian sasaran selama tahun 2025 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2025.

B. Tujuan

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman;
4. Peningkatan kredibilitas terhadap pemberi wewenang;
5. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih, efektif, efisien dan responsif

C. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pasaman ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Tahun 2021 - 2026.
- 6) Peraturan Bupati Pasaman Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Revisi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026.

D. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman

Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman.

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sesuai Peraturan Bupati nomor 1 tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - (a) Bagian Pemerintahan membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemerintahan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Kewilayahan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerjasama dan Otonomi Daerah.
 - (b) Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Mental Spiritual;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesejahteraan Sosial; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesejahteraan Masyarakat.
 - (c) Bagian Hukum membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perundang-Undangan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bantuan Hukum; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Dokumentasi dan Informasi.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
 - (a) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan BUMD dan BLUD;

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perekonomian; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Alam.
- (b) Bagian Administrasi Pembangunan membawahi:
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyusunan Program;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Program; dan
 3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
- (c) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa membawahi :
1. Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 2. Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 3. Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
4. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
- (a) Bagian Umum membawahi:
1. Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- (b) Bagian Organisasi membawahi :
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- (c) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan membawahi:
1. Subbagian Protokol;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Komunikasi Pimpinan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Dokumentasi Pimpinan.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Sesuai dengan Perbup nomor 1 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas fungsinya.

c. Isu Strategis

Analisis isu – isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis diharapkan dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pasaman dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Peningkatan pengamalan nilai-nilai agama dan adat dalam kehidupan masyarakat dan pemerintah.
2. Terciptanya kondisi kerja yang kondusif, terukur dan terarah.
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM.
4. Terlaksananya tata kelola pelayanan publik dengan baik.

d. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Untuk menjalankan roda organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman dalam mencapai tujuannya dilengkapi dengan 155 orang personil dengan komposisi 84 orang aparatur sipil negara, 16 orang PPPK dan 55 orang PPPK paruh waktu. Dari 180 orang aparatur, 36 orang dipercayakan untuk menduduki jabatan struktural dan Jabatan Fungsional sebagai berikut:

- ✓ 3 orang Staf Ahli Bupati, eselon II b
- ✓ 3 orang Asisten Sekretariat Daerah eselon II b
- ✓ 9 orang Kepala Bagian, eselon III a
- ✓ 8 orang Kasubag, eselon IV a
- ✓ 11 orang Pejabat Fungsional

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan aparatur sipil negara yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman telah sesuai dengan formasi persyaratan atau tuntutan pekerjaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman.

Jika dilihat dari pangkat dan golongan maka Pegawai Negeri Sipil yang 84 orang ini dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.2
Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman
berdasarkan golongan

No.	Pangkat	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Madya	IV/d	1
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	4
2.	Pembina Tk.I	IV/b	6
3.	Pembina	IV/a	7
4.	Penata Tk.I	III/d	19
5.	Penata	III/c	13
6.	Penata Muda Tk.I	III/b	10
7.	Penata Muda	III/a	13
8.	Pengatur Tk. I	II/d	4
9.	Pengatur	II/c	4
10.	Pengatur Muda Tk.I	II/a	2
11.	Juru	I/c	1
	J u m l a h		84

Dari tabel di atas dapat dilihat komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman berdasarkan golongan yaitu sebagai berikut :

- Golongan IV sebanyak 18 orang
- Golongan III sebanyak 55 orang
- Golongan II sebanyak 10 orang
- Golongan I sebanyak 1 orang

Tercukupinya sarana dan prasarana di Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman yang memadai merupakan salah satu faktor penting yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman. Sarana dan prasarana ini berpengaruh terhadap kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan program kerja yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan di Bagian Umum. Selain profesionalisme pegawai, dengan tercukupinya sarana dan

prasarana yang sesuai kebutuhan di lapangan, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman akan semakin berjalan lancar, tertib, cepat dan mendukung kenyamanan dalam bekerja.

e. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2025 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang, tujuan, dasar hukum, Gambaran Umum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN:

1. Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025
2. Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026
3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran SKPD yang digunakan sebagai acuan dan instrumen evaluasi keberhasilan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman dilakukan secara simultan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman tahun 2021 - 2026. Penyusunan dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu : tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD.

Keselarsan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman selama tahun 2021 – 2026, dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ SASARAN)	SATUAN	TARGET CAPAIAN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Misi 1. Meningkatkan Kualitas Keimanan Dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta Meningkatkan Peran Lembaga Adat										
	Meningkatnya pengamalan ajaran agama		Persentase anak usia sekolah melek huruf Al quran	%	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keagamaan	1. Peringkat MTQ Tingkat Propinsi	Peringkat	10	10	6	6	3	3
			2. Jumlah Muzakki	Orang	5.000	5.050	5.100	5.150	5.200	5.250
			3.							
Misi 6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih										
1.	Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel		1. Capaian EKPPD	Skor	3,3840	3,3846	3,3856	3,3866	3,3876	3,3886
			2. Predikat SAKIP	Predikat	B (61,38)	B (64,85)	B (66,70)	B (68,65)	BB (70,85)	ST (73,15)
			3. Penggunaan E Procurement terhadap belanja pengadaan	%	100	100	100	100	100	100
		1. Mewujudkan akuntabilitas kinerja Setda	1. Nilai EMPPD Setda	Predikat	ST (3,260)	ST (3,275)	ST (3,280)	ST (3,285)	ST (3,290)	ST (3,295)
			2. Nilai SAKIP Setda	Predikat	BB (76,05)	BB (78,10)	BB (80,00)	A (82,15)	A (84,05)	A (86,00)
		2. Terwujudnya Pembangunan yang bersinergitas dan tepat sasaran	Persentase realisasi kegiatan yang mencapai target kinerja	%	100	100	100	100	100	100
2.	Mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas		Indeks persepsi kualitas pelayanan	Indeks	77,54	79,54	81,54	83,54	85,54	87,54
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase OPD yang pengelolaan pelayanan publiknya berpredikat baik	%	100	100	100	100	100	100

B. PERJANJIAN KINERJA

Pada tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman memperjanjikan target kinerja yang tertera pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja 2025**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	Penanggung Jawab
2	3	4	
1.1 Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keagamaan	1. Peringkat MTQ tingkat Propinsi	3	Bagian Kesra
	2. Jumlah Muzaki yang menyalurkan zakat melalui lembaga zakat resmi	5.200	Bagian Kesra

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	Penanggung Jawab
2	3	4	
	daerah		
2.1 Mewujudkan akuntabilitas kinerja Setdamenca	Nilai EMPPD Setda	ST (3,290)	Bagian Pemerintahan
	Nilai SAKIP Setda	A (84,05)	Bagian Organisasi
2.2 Terwujudnya pembangunan bersinergitas yang tepat sasaran	Persentase realisasi kegiatan yang pai target kinerja	100	Bagian Adm. Pembangunan
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase OPD yang pengelolaan pelayanan publiknya berpredikat baik	100	Bagian Organisasi

Tabel 2.2.
Program dan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2025

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp24.222.827.772,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp97.707.140,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp5.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp92.707.140,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp10.839.481.364,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp10.598.881.364,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp240.600.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp6.800.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp6.800.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp3.977.737.752,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp83.878.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp529.513.380,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp18.494.652,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp1.262.960.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp2.082.891.720,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Rp1.379.300.000,00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp1.250.000.000,00
Pengadaan Mebel	Rp129.300.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp3.445.779.846,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp696.247.846,00

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp2.749.532.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.667.704.720,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp581.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp173.000.000,00
Pemeliharaan Mebel	Rp15.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp200.340.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp603.364.720,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp95.000.000,00
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp877.108.720,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp177.058.720,00
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp200.050.000,00
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp100.000.000,00
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp400.000.000,00
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp1.324.826.180,00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rp569.689.000,00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Rp543.799.000,00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Rp211.338.180,00
Penataan Organisasi	Rp302.190.550,00
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp76.828.000,00
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp51.958.900,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp74.524.300,00
Fasilitasi Keprotokolan	Rp230.577.900,00
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp12.370.100,00
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp61.243.500,00
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp8.859.182.677,00
Administrasi Tata Pemerintahan	Rp170.999.121,00
Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp104.882.684,00
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp42.009.313,00
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp24.107.124,00
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp8.136.883.905,00
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp4.733.898.905,00
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Rp3.402.985.000,00
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp511.207.950,00

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp357.774.100,00
Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp108.854.950,00
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp44.578.900,00
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Rp40.091.701,00
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Rp40.091.701,00
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp759.092.200,00
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp217.393.100,00
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp115.782.500,00
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp84.231.500,00
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Rp17.379.100,00
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp307.688.000,00
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Rp60.952.000,00
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp109.938.500,00
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp136.797.500,00
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp172.422.500,00
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp61.886.000,00
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Rp57.836.000,00
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp52.700.500,00
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp61.588.600,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Rp21.897.500,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Rp22.552.100,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Rp17.139.000,00
TOTAL ANGGARAN	Rp33.841.102.649,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025.

Berdasarkan Renstra 2021-2026 telah ditetapkan 3 (tiga) tujuan dan 4 (empat) Sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja. Tahun 2025 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kab. Pasaman.

Evaluasi Indikator kinerja utama dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai dengan kriteria penilaian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan interval penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tabel Interval

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

A. Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman telah dapat melaksanakan tugas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Nomor : 188.08/ 05 /2022.

Capaian indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman
Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keagamaan	1. Peringkat MTQ Tingkat Provinsi	Rangking	3	11	50%
	2. Jumlah muzakki yang meyalurkan zakat melalui lembaga zakat resmi daerah	Orang	5.200 orang	5.858 orang	112,65%
Mewujudkan Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	1. Nilai EMPPD Setda	Predikat	ST (3,290)	T (2,779)	84,60%
	2. Nilai SAKIP Setda	Predikat	A (84,05)	BB (78,40)	93,27%
Terwujudnya pembangunan bersinergitas yang tepat sasaran	Persentase realisasi kegiatan yang mencapai target kinerja	%	100	85,55%	85,55%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase OPD yang pengelolaan pelayanan publiknya berpredikat baik	%	100	100%	100%
Total					87,68%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2025 adalah sebesar 87,68 %. Dengan demikian hasil capaian kinerja termasuk klasifikasi berhasil dengan predikat tinggi.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

1. Membandingkan Antar Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini, berikut analisis pendukung

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keagamaan					Formula Perhitungan/ Penjelasan
	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	
1	2	4	5	6	7
1	Peringkat MTQ Tingkat Provinsi	3	11	50%	Diukur berdasarkan hasil MTQ tingkat Propinsi
2	Jumlah muzakki yang meyalurkan zakat melalui lembaga zakat resmi daerah	5.200 Orang	5.858 Orang	112,65 %	Diukur berdasarkan data dari BAZNAS
Sasaran Strategis 2 : Mewujudkan Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah					
1	Nilai EMPPD Setda	ST (3,290)	T (2,779)	84,60 %	Diukur berdasarkan hasil EKPPD Kab. Pasaman
2	Nilai SAKIP Setda	BB (84,05)	BB (78,40)	93,27%	Diukur berdasarkan evaluasi SAKIP Kab. Pasaman
Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya pembangunan bersinergitas yang tepat sasaran					
1	Persentase realisasi kegiatan yang mencapai target	100%	85,55%	85,55%	$\frac{\text{Jumlah Sub Kegiatan yang Mencapai Target}}{\text{Jumlah Sub Kegiatan}} \times 100\%$
Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan public					
1	Persentase pengelolaan pelayanan publik OPD berpredikat baik	100%	100%	100%	$\frac{\text{Jumlah OPD yang Pelayanan Publiknya Baik}}{\text{Jumlah OPD yang Melaksanakan Pelayanan Publik}} \times 100\%$

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir, berikut analisis pendukung

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Lalu dan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja	Target Kinerja sesuai Renstra (selama 5 tahun)	Pencapaian Kinerja Tahun 2021	Pencapaian Kinerja Tahun 2022	Pencapaian Kinerja Tahun 2023	Pencapaian Kinerja Tahun 2024	Pencapaian Kinerja Tahun 2025
1. Peringkat MTQ Tingkat Provinsi	3	4	4	10	10	11
2. Jumlah muzakki yang meyalurkan zakat melalui lembaga zakat resmi daerah	5.200 orang	8.024 orang	4.145 Orang	4.139 Orang	6.250 Orang	5.858 orang
1. Nilai EMPPD Setda	3,290	ST (3,160)	ST (3,160)	T (2,779)	T (2,779)	T (2,779)
2. Nilai SAKIP Setda	82,15	BB (74,05)	BB (74,42)	BB (78,11)	BB (79,45)	BB(78,40)
Persentase realisasi kegiatan yang mencapai target	100%	88,19	85	95,56	88,13	85,55
Persentase pengelolaan pelayanan publik OPD berpredikat baik	100%	84,62	84,62	100%	100%	100%

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, berikut analisis pendukung

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 sampai dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target kinerja Sesuai Renstra (selama 5 Tahun)	Akumulasi kinerja s.d tahun 2025	% capaian
1	2	7	8	
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keagamaan	1. Peringkat MTQ Tingkat Provinsi	7	8	86%
	2. Jumlah muzakki yang meyalurkan zakat melalui lembaga zakat	5.100 orang	5.683 Orang	111,43 %

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target kinerja Sesuai Renstra (selama 5 Tahun)	Akumulasi kinerja s.d tahun 2025	% capaian
1	2	7	8	
	resmi daerah			
Mewujudkan Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	1. Nilai EMPPD Setda	3,278	ST (2,906)	88,65
	2. Nilai SAKIP Setda	80,07	A (93,31)	116,53
Terwujudnya pembangunan bersinergitas yang tepat sasaran	Persentase realisasi kegiatan yang mencapai target	100%	88,69%	86,69
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase OPD yang pengelolaan pelayanan publiknya berprediket BAIK	100%	34,65%	34,65%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

1. Indikator kinerja peringkat MTQ Tingkat Provinsi untuk tahun 2025 diperoleh peringkat 11 jika dibandingkan dengan tingkat nasional Sumatera Barat memperoleh peringkat 11 pada pelaksanaan MTQ tingkat Nasional pada tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Timur, artinya capaian tingkat nasional sama dengan peringkat kabupaten.
2. Indikator kinerja nilai evaluasi mandiri penyelenggaraan pemerintahan daerah Setda untuk tahun 2025 tidak dilaksanakan sehingga realisasi nya diperoleh dari tahun 2023 yaitu dengan nilai 2,779 (T) jika dibandingkan dengan nasional evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pasaman 3.11 artinya lebih tinggi capaiannya tingkat nasional 0,331 .
3. Indikator nilai SAKIP Setda untuk tahun 2025 diperoleh nilai 78,40 dengan prediket BB jika dibandingkan dengan nasional nilai SAKIP Kabupaten Pasaman diperoleh nilai 63,10 prediket B artinya capaian tingkat nasional lebih rendah dari nilai SAKIP Setda.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan.

- a. sasaran 1

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keagamaan

Sasaran ini diukur dengan dengan 2 (dua) indikator kinerja yang meliputi : Peringkat MTQ tingkat Propinsi dan Jumlah muzakki yang menyalurkan zakat melalui lembaga zakat resmi daerah.

Sebagai kabupaten yang mayoritas penduduknya beragama islam serta memiliki historis sebagai sentral penyebaran agama islam pada masa lampau dengan landasan filosofi ABS-SBK, sampai saat ini belum mampu secara optimal diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan di Kabupaten Pasaman. Selain itu, pemahaman nilai-nilai ajaran agama juga belum sepenuhnya terlaksana, begitu juga dengan pelestarian dan pengembangan adat dan budaya belum optimal menyentuh peranan generasi muda Pasaman. Pada tahun 2024 dilaksanakan MTQ tingkat Kabupaten di Kecamatan Simpang Alahan Mati. Lomba ini di juarai oleh peserta dari Kecamatan Rao. Ini bertujuan untuk mencari khafilah untuk tingkat provinsi. Dan pada tahun 2025 diselenggarakan MTQ nasional Tk. Provinsi di Kota Bukittinggi, dimana Kabupaten Pasaman meraih peringkat ke 11. Capaian ini menjadi realisasi indikator kinerja peringkat MTQ Tingkat Propinsi Tahun 2025.



MTQ Tingkat Nasional

Upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja pada sasaran ini adalah :

1. Pemberian insentif terhadap guru TPQ/TPSQ dan MDTA
2. Pelaksanaan Seleksi Tahfizd Qur'an dengan menseleksi para hafizd qur'an di setiap Kecamatan dari tingkatan 1 Juz sampai dengan 30 Juz
3. Pelaksanaan wisuda masal para hafizd qur'an

Hal yang menjadi penghambat rendahnya capaian indikator dalam sasaran ini :

1. Belum maksimalnya pembinaan kehidupan beragama masyarakat
2. Belum maksimalnya pemanfaatan fasilitas keagamaan sebagai pusat kegiatan masyarakat
3. Belum optimalnya fasilitasi lembaga keagamaan

Langkah strategis yang dilakukan dalam upaya perbaikan kedepan

1. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dimasing-masing nagari
2. Meningkatkan pemanfaatan fasilitas keagamaan.

Untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keagamaan, disediakan anggaran APBD pada Setda Tahun 2025 yaitu sebesar Rp8.859.182.677,00 anggaran ini tersedia di Bagian Kesra dengan 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Dari jumlah anggaran yang tersedia Rp4.733.898.905,00 terealisasi 4.677.277.022,00 atau 98,80% artinya terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 56.621.883,00 (1,2%). Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian sasaran sasaran Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keagamaan 69,96 % lebih rendah dari realisasi anggaran 98,80%.

b. sasaran 2

Mewujudkan Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah

Sasaran ini didukung dengan 2 (dua) indikator yaitu nilai SAKIP Setda dan Nilai EMPPD Setda.

✓ Nilai SAKIP Setda

Pada tahun 2024 capaian nilai SAKIP Setda menurun dari tahun sebelumnya 79,45 predikat BB menjadi 78,40 predikat BB. Nilai ini merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Setda. Nilai SAKIP Setda Tahun 2024 adalah hasil evaluasi SAKIP yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat, dengan rincian penilaian sebagai berikut:

- Perencanaan Kinerja : bobot 30 dengan nilai 23,10
- Pengukuran Kinerja : bobot 30 dengan nilai 23,10
- Pelaporan Kinerja : bobot 15 dengan nilai 11,70
- Evaluasi akuntabilitas Internal : bobot 25 dengan nilai 20,50

Upaya yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indicator nilai SAKIP Setda adalah sebagai berikut :

- ✓ Sistem Perencanaan dan Penganggaran
Sekretariat Daerah telah menerapkan SIPD dalam system perencanaan dan penganggaran
- ✓ Pelaksanaan rapat di lingkungan Setda dalam rangka penyusunan pohon kinerja dan rencana aksi pencapaian kinerja
- ✓ Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja, program, kegiatan dan sub kegiatan Setda
- ✓ Mengikuti Asistensi Pemantapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- ✓ Mengikuti optimalisasi penggunaan aplikasi SAKIP
- ✓ Penyusunan dokumen Renja 2025 Setda
- ✓ Pelaksanaan penyusunan LKJIP dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Pasaman dan Setda.



Asistensi Pemantapan SAKIP



Asistensi Pemantapan SAKIP

- a. Terlaksananya Asistensi Pemantapan Aplikasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman yang dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 19 Juni 2025 di Ruang Rapat Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman.



Asistensi pemantapan Aplikasi SAKIP

- b. Terlaksananya Optimalisasi Aplikasi SAKIP yang dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 11 Juli 2025 di Aula Lantai III Kantor Bupati Pasaman.



Optimalisasi Aplikasi SAKIP

Hal yang menjadi penghambat rendahnya capaian indikator Nilai SAKIP Setda antara lain :

1. Masih kurangnya koordinasi antar bagian dalam pencapaian kinerja nilai SAKIP Setda
2. Keterbatasan sarana dan prasana anggaran untuk pencapaian kinerja nilai SAKIP Setda

Langkah strategis yang akan dilakukan untuk upaya perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi antar bagian terkait pencapaian kinerja Setda
2. Meningkatkan sarana dan prasarana khususnya untuk pencapaian nilai SAKIP Setda

✓ Nilai EMPPD

Untuk indikator kinerja nilai EMPPD Setda pada tahun 2024 diperoleh nilai 2,779 dengan prestasi kerja B Kategori Tinggi nilai ini diperoleh dari hasil nilai tahun 2023 karena pada tahun 2025 telah dilaksanakan proses evaluasi mandiri, namun tidak dapat diselesaikan karena keterbatasan waktu.

Salah satu strategi utama yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan Dalam rangka peningkatan kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman melakukan penilaian mandiri yang dilaksanakan terhadap kinerja Perangkat Daerah.

Upaya yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja adalah :

1. Melaksanakan Evaluasi mandiri penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah

Hal yang menjadi penghambat rendahnya capaian indikator dalam sasaran ini :

- 1) Komitmen pimpinan dan jajarannya terhadap keselarasan kinerja, pencapaian sasaran dan indikator masih perlu diperkuat.
- 2) Aplikasi yang wajib digunakan (SIPD) belum sepenuhnya terintegrasi serta belum menjawab kebutuhan daerah
- 3) Ketepatan waktu pelaporan serta kesesuaian target capaian kinerja kegiatan masih perlu ditingkatkan.
- 4) Kurang adanya sinergi dalam proses perencanaan, sehingga pencapaian beberapa Indikator Kinerja Kunci yang menjadi indikator penilaian belum maksimal.

Langkah strategis yang dilakukan dalam upaya perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Perlunya komitmen pimpinan serta jajarannya untuk penyelarasan indikator sehingga capaian sasaran dan capaian target indikator kinerja dapat tercapai dengan baik.
- 2) Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pemerintah pusat sehingga dapat sepenuhnya terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan daerah
- 3) Memberikan pendampingan dalam penyusunan terhadap laporan kinerja dengan melakukan pedalaman analisa capaian kinerja, bukan hanya pelaksanaan kegiatan dan capaian anggaran saja dan juga pendampingan dalam upaya pencapaian indikator kinerja kunci
- 4) Melakukan reuiu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU;
- 5) Melaksanakan koordinasi lintas Perangkat Daerah.

Untuk mendukung pencapaian sasaran Mewujudkan Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah, disediakan anggaran APBD pada Setda Tahun 2025 yaitu

sebesar Rp. 24.222.827.772,00 anggaran ini tersedia di Bagian Umum, Protokol Kompim dan Bagian Organisasi dengan 1 program dan 12 kegiatan. Dari jumlah anggaran yang tersedia Rp. 24.222.827.772,00 terealisasi Rp.21.496.853.688,00 atau 88,75% artinya terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.2.725.974.084,00 (11,25%). Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian sasaran Mewujudkan Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah 88,93% lebih tinggi dari realisasi anggaran 88,75%

c. sasaran 3

Terwujudnya Pembangunan Bersinergitas Yang Tepat Sasaran

sasaran strategis ini didukung dengan indikator kinerja persentase kegiatan yang mencapai target, capaian indikator untuk tahun 2025 adalah sebesar 88,39%.

Sinergitas adalah membangun dan memastikan hubungan internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan. Sinergitas merupakan kunci keberhasilan dalam melakukan upaya pembangunan. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman terus mendorong sinergi antara Organisasi Perangkat Daerah. Sinergitas diperlukan untuk saling menguatkan dengan melakukan pembangunan dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh suatu entitas dengan entitas lainnya guna meningkatkan daya saing, efektifitas kecepatan layanan ataupun eksekusi, serta kenyamanan pengguna.

Upaya yang telah dilaksanakan dalam pencapaian kinerja sasaran adalah :

1. menyusun laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan
2. melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan
3. melaksanakan rapat koordinasi setiap bulan

Secara umum indikator ini belum dapat tercapai secara maksimal sesuai dengan target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

Hal yang menjadi penghambat rendahnya capaian indikator dalam sasaran ini :

- 1) Ketepatan waktu pelaporan serta kesesuaian target capaian kinerja kegiatan masih perlu ditingkatkan
- 2) Masih kurangnya SDM sehingga tidak memenuhi tuntutan tugas dan beban kerja

3) Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.

Langkah strategis yang dilakukan dalam upaya perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Perlunya komitmen pimpinan serta jajarannya sehingga capaian kegiatan dapat tercapai dengan baik.
- 2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM
- 3) Meningkatkan koordinasi antar bagian

Untuk mendukung pencapaian sasaran Terwujudnya pembangunan bersinergitas yang tepat sasaran, disediakan anggaran APBD pada Setda Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 759.092.200,00 anggaran ini tersedia di Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan 1 program dan 4 kegiatan. Dari jumlah anggaran yang tersedia Rp.759.092.200,00 terealisasi Rp.418.814.845,00 atau 55,17% artinya terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.340.277.355,00 (44,83%). Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian sasaran Terwujudnya pembangunan bersinergitas yang tepat sasaran 88,53% lebih tinggi dari realisasi anggaran 55,17%.

d. sasaran 4

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

indikator kinerja yang mendukung sasaran ini adalah Persentase pengelolaan pelayanan publik OPD berpredikat baik.

Upaya-Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik adalah

1. melaksanakan monitoring dan pembinaan terhadap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPPP) dan melaksanakan penilaian pelayanan publik terhadap seluruh UPPP.



Penilaian pelayanan publik

2. Untuk mengukur kepuasan Masyarakat dilaksanakan melalui survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik secara berkala serta sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan publik dan sebagai umpan balik dalam memperbaiki pelayanan. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik serta kemungkinan replikasi inovasi pelayanan publik.
3. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik maka untuk pertama kalinya Nagari di Kabupaten Pasaman maju dalam program Nagari anti Maladministrasi.



Lounging Nagari Anti Maladministrasi

4. Melaksanakan penyusunan laporan hasil survey Mandiri Indeks Kepuasan Masyarakat pada 117 Unit Pelayan Publik dengan kategori Perangkat Daerah, Kecamatan, Puskesmas, Nagari dan BLUD yang telah disampaikan ke Kemenpan RB. Survey ini dilakukan secara online, tujuannya agar pelaksanaan survey kepuasan masyarakat lebih efisiensi, transparan dan akuntabilitas pelayanan publik. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat, kualitas system serta komitmen instansi dalam menindaklanjuti hasil survey. Laporan hasil survey Mandiri Indeks Kepuasan Masyarakat pada 117 UPP yang telah disampaikan ke Kemenpan RB dengan nilai IKM 87,37 dengan mutu pelayanan baik.

5. Terlaksananya Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk 2 Unit Pelayanan Publik (UPP) Disdukcapil dan DPMPTSP pada tanggal 26 November 2025 di Aula Kantor Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kankemenag Kabupaten Pasaman.



FKP 2025

- Hal yang menjadi penghambat rendahnya capaian indikator dalam sasaran ini ::
- 1) Komitmen pimpinan dan jajarannya terhadap peningkatan standar pelayanan publik masih perlu diperkuat.
 - 2) Ketepatan waktu pelaporan serta kesesuaian target capaian kinerja kegiatan masih perlu ditingkatkan.

Langkah strategis yang dilakukan dalam upaya perbaikan kedepan :

- 1) Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pelayanan publik dengan baik.
- 2) Melakukan pembinaan terhadap unit penyelenggara pelayanan publik secara kontiniu dan berkelanjutan.

Untuk mendukung pencapaian sasaran terwujudnya kualitas pelayanan publik, disediakan anggaran APBD pada Setda Tahun 2025 yaitu sebesar Rp.51.958.900,00 anggaran ini tersedia di Bagian Organisasi dengan 2 sub kegiatan. Dari jumlah anggaran yang tersedia Rp.51.958.900,00 terealisasi Rp.39.454.300,00 atau 75,93% artinya terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.12.504.600,00 (24,07%). Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian sasaran Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang tepat sasaran 100% lebih tinggi dari realisasi anggaran 75,93%.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat diketahui dari : upaya yang mendukung Sekretariat Daerah untuk pencapaian kinerja. Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025, telah ditetapkan 3 (tiga) Program dengan alokasi anggaran pada Perubahan APBD sebesar Rp33.841.102.649,00 dan terealisasi sebesar Rp29.959.320.315,00, dengan persentase realisasi anggaran sebesar 88,53 %. dengan realisasi fisik masing-masing program, kegiatan dan subkegiatan sebesar 98,01%. Tingginya realisasi fisik dan keuangan menunjukkan efektifitas dan efisiensi Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan anggaran, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025.

sedangkan untuk kebutuhan Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan indikator kinerja yang diberikan, Sekretariat Daerah membutuhkan pegawai sebanyak 273 orang. Sedangkan ketersediaan SDM untuk pelaksanaan kegiatan tersebut hanya sebanyak 81 orang. Dapat kita ketahui bahwa terdapat kekurangan pegawai sebanyak 192 orang. Namun dengan efisiensi sumber daya dan anggaran tersebut, Sekretariat Daerah masih dapat melaksanakan indikator tersebut.

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Keberhasilan capaian kinerja sasaran tersebut didukung oleh 3 (tiga) Program dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 3.6
Program/Kegiatan Penunjang Tahun 2025

Sasaran Strategis	% Capaian	Program	Kegiatan
1	2	3	4
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keagamaan	77,33%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 2. Pelaksanaan Kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat
Mewujudkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	90,65%	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
Terwujudnya pembangunan bersinergitas yang tepat sasaran	88,13%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Mewujudkan Pelayanan Publik Sesuai Standar	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penataan organisasi

B. Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2025

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	TINGKAT CAPAIAN 2025
	Rp	Rp	Rp	Rp
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8.859.182.677	8.043.651.782	815.530.895	90,79
Administrasi Tata Pemerintahan	170.999.121	143.501.305	27.497.816	83,92
Penataan Administrasi Pemerintahan	104.882.684	99.099.805	5.782.879	94,49
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	42.009.313	26.227.050	15.782.263	62,43
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	24.107.124	18.174.450	5.932.674	75,39
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	8.136.883.905	7.529.788.022	607.095.883	92,54
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4.733.898.905	4.677.227.022	56.671.883	98,80
Pelaksanaan Kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan social	3.402.985.000	2.852.561.000	550.424.000	83,83

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	TINGKAT CAPAIAN 2025
	Rp	Rp	Rp	Rp
Pelaksanaan Kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	0	0	0	0
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	511.207.950	339.515.670	171.692.280	66,41
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	357.774.100	233.916.085	123.858.015	65,38
Fasilitasi Bantuan Hukum	108.854.950	72.071.900	36.783.050	66,21
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	44.578.900	33.527.685	11.051.215	75,21
Fasilitasi Kerjasama Daerah	40.091.701	30.846.785	9.244.916	76,94
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	40.091.701	30.846.785	9.244.916	76,94
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	759.092.200	418.814.845	340.277.355	55,17
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	217.393.100	130.323.645	87.069.455	59,95
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	115.782.500	41.591.145	74.191.355	35,92
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	84.231.500	77.094.350	7.137.150	91,53
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	17.379.100	11.638.150	5.740.950	66,97
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	307.688.000	124.813.650	182.874.350	40,57
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	60.952.000	29.879.100	31.072.900	49,02
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	109.938.500	54.313.350	55.625.150	49,40
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	136.797.500	40.621.200	96.176.300	29,69
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	172.422.500	127.186.000	45.236.500	73,76
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	61.886.000	54.528.450	7.357.550	88,11
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	57.836.000	26.459.800	31.376.200	45,75
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	52.700.500	46.197.750	6.502.750	87,66
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	61.588.600	36.491.550	25.097.050	59,25
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	21.897.500	11.139.750	10.757.750	50,87
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	22.552.100	11.876.200	10.675.900	52,66
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	17.139.000	13.475.600	3.663.400	78,63
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.222.827.772	21.496.853.688	2.725.974.084	88,75
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	97.707.140	79.853.500	17.853.640	81,73
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	4.031.300	968.700	80,63

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	TINGKAT CAPAIAN 2025
	Rp	Rp	Rp	Rp
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.707.140	75.822.200	16.884.940	81,79
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.839.481.364	10.243.654.258	595.827.106	94,50
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.598.881.364	10.012.074.258	586.807.106	94,46
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	240.600.000	231.580.000	9.020.000	96,25
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.800.000	6.800.000	0	100,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	6.800.000	6.800.000	0	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.977.737.752	3.599.797.302	377.940.450	90,50
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	83.878.000	72.557.000	11.321.000	86,50
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	529.513.380	473.151.228	56.362.152	89,36
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.494.652	14.676.500	3.818.152	79,36
Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.262.960.000	1.156.782.000	106.178.000	91,59
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.082.891.720	1.882.630.574	200.261.146	90,39
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.379.300.000	1.337.351.000	41.949.000	96,96
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.250.000.000	1.214.600.000	35.400.000	97,17
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-
Pengadaan Mebel	129.300.000	122.751.000	6.549.000	94,94
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.445.779.846	2.835.792.743	609.987.103	82,30
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	696.247.846	583.104.159	113.143.687	83,75
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.749.532.000	2.252.688.584	496.843.416	81,93
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.667.704.720	1.023.815.515	643.889.205	61,39
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	581.000.000	335.912.506	245.087.494	57,82
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	173.000.000	135.885.600	37.114.400	78,55
Pemeliharaan Mebel	15.000.000	1.640.000	13.360.000	10,93
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.340.000	119.657.865	80.682.135	59,73
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	603.364.720	336.036.544	267.328.176	55,69
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	95.000.000	94.683.000	317.000	99,67

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	TINGKAT CAPAIAN 2025
	Rp	Rp	Rp	Rp
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	877.108.720	741.830.627	135.278.093	84,58
Penyediaan Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	177.058.720	146.280.627	30.778.093	82,62
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	200.050.000	199.550.000	500.000	99,75
Pelaksanaan Medical Check up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.000.000	-	-	-
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000	396.000.000	4.000.000	99,00
Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	1.324.826.180	1.155.675.350	169.150.830	87,23
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	569.689.000	529.251.270	40.437.730	92,90
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	543.799.000	433.857.000	109.942.000	79,78
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekreariat Daerah	211.338.180	192.567.080	18.771.100	91,12
Penataan Organisasi	302.190.550	201.534.540	100.656.010	66,69
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	76.828.000	38.339.090	38.488.910	49,90
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	51.958.900	39.454.300	12.504.600	75,93
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	43.331.400	24.484.550	18.846.850	56,51
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	55.547.950	39.642.000	15.905.950	71,37
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	74.524.300	61.074.000	13.450.300	81,95
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	304.191.500	270.748.853	33.442.647	89,01
Fasilitasi Keprotokolan	230.577.900	216.165.453	14.412.447	93,75
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12.370.100	2.827.000	9.543.100	22,85
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	61.243.500	51.756.400	9.487.100	84,51
TOTAL	33.841.102.649	29.959.320.315	3.881.782.334	88,53

Pada tahun 2025 anggaran yang tersedia pada Sekretariat Daerah adalah sebesar **Rp33.841.102.649,00** dan terealisasi sebesar **Rp 29.959.320.315,00**, dengan persentase realisasi anggaran sebesar **88,53%**.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran- sasaran strategisnya. Sebanyak 4 (empat) sasaran, untuk mencapai 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU), 3 (tiga) Program dan 19 (sembilan belas) kegiatan dengan capaian indikator kinerja 83,89 % dan capaian realiasi anggaran 88,53%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian indikator kinerja Sekretariat Daerah menurun 4,64%.

Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, meskipun tidak ada yang melebihi target. Disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dipenuhi sesuai dengan harapan.

2. saran

Berdasarkan capaian kinerja Setda tahun 2025, untuk meningkatkan kualitas perencanaan kedepan disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. terus berupaya meningkatkan dan mempertahankan akuntabilitas yang sudah baik untuk capaian kinerja yang lebih baik
2. memperbaiki target yang sudah melebihi target pada perjanjian kinerja.